

## **Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan Untuk Perguruan Tinggi Yang Ber-Integritas**

### **Overview Perkembangan Program**

Perguruan tinggi merupakan sebuah institusi yang tak lagi bebas dari korupsi, ada berbagai macam kasus korupsi di perguruan tinggi yang makin mencuat, korupsi yang melilit perguruan tinggi sangat disayangkan karena perguruan tinggi sejatinya adalah benteng penjaga moral, tempat transformasi keilmuan dan kaderisasi pemimpin masa depan. Sehingga terungkapnya kasus korupsi di perguruan tinggi berdampak pada kepercayaan publik, apakah perguruan tinggi masih layak untuk menjadi pusat untuk melahirkan pemimpin masa depan?

Pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan (PPKK), diyakini sebagai sebuah upaya untuk memutus mata rantai korupsi di perguruan tinggi, karena ada dugaan bahwa konflik kepentingan sebagai salah satu penyebab korupsi. Untuk itu, Transparency International Indonesia dan Universitas Airlangga melakukan sebuah kerjasama untuk mencegah dan mengendalikan konflik kepentingan dalam rangka membangun tekat perguruan tinggi yang berkualitas

Program yang sudah memasuki tahun kedua telah mengalami berbagai macam perkembangan, terutama perkembangan yang terjadi pada sektor-sektor yang memang diuji coba untuk mencegah dan mengendalikan konflik kepentingan. Adapun sektor tersebut adalah di direktorat Sumberdaya Manusia dan Direktorat Pusat Layanan Pengadaan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang terjadi selama proses uji coba dan pendampingan yang dilakukan oleh tim Transparansi Internasional Indonesia bersama tim internal pada kedua direktorat tersebut, berikut adalah beberapa progress yang sudah terjadi

### **Pusat Layanan Pengadaan**

Direktorat Pusat Layanan Pengadaan merupakan salah satu sektor yang menjadi obyek dari percobaan program pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di lingkungan Universitas Airlangga. PLP sebagai organ utama yang mengatur soal penyediaan kebutuhan barang dan jasa di lingkungan Universitas Airlangga, mempunyai posisi strategis untuk dijadikan contoh sebagai direktorat yang mempunyai komitmen untuk mencegah konflik kepentingan, karena direktorat ini berhubungan dengan pihak eksternal yang menyediakan barang maupun jasa. Sehingga adanya komitmen dan perkembangan yang terjadi akan memberikan dampak yang bagus terkait dengan mutu dan kualitas barang maupun jasa yang diperlukan oleh UNAIR.

#### **❖ Direktorat Pusat Layanan Pengadaan**

- **Sudah adanya praktik baik di PLP seperti pakta integritas antara pelaksana pengadaan dengan penyedia barang dan jasa.** Praktik baik penggunaan pakta integritas yang dilakukan oleh PLP dengan pihak penyedia barang dan jasa merupakan salah satu bentuk oprasionalisasi komitmen untuk menerapkan prinsip antikorupsi dalam setiap proses pengadaan, sehingga hal ini menjadi point penting untuk diterapkan dan diformalkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan dicontoh oleh direktorat yang lain maupun pada unit kerja di Universitas
- **Adanya upaya PLP untuk mencegah konflik kepentingan dengan penyedia barang dan jasa. Misalnya, PLP tidak mengizinkan penyedia barang dan jasa untuk datang sebelum pemenang proyek diputuskan, melarang kontak langsung (pertemuan) antara personal PLP dengan penyedia barang dan jasa, dan lain-**

**lain.** Praktik ini merupakan salah upaya penting yang dilakukan oleh PLP untuk mencegah terjadinya kontak dengan pihak-pihak penyedia yang sedang memproses untuk ikut proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dilakukan di Unair. Pada poin ini menjadi penting untuk kemudian diterapkan sebagai salah satu basis kebutuhan untuk diadopsi dalam format regulasi tertulis untuk menjadi pijakan dalam kerangka mencegah dan menghindari konflik kepentingan

- **Adanya upaya standarisasi dokumen pengadaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.** Beberapa kajian soal potensi korupsi pengadaan barang dan jasa yang pernah dilakukan oleh KPK, dokumen pengadaan merupakan faktor penting yang perlu diselaraskan dan jika perlu tidak tumpang tindih antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. PLP sudah melakukan inisiasi untuk membuat standart dokumen yang sama, sehingga hal ini untuk memitigasi terjadinya konflik kepentingan yang biasanya dokumen yang berbeda-beda akan mempersulit proses pengawasan dan pendampingan
- **PLP sedang menyusun regulasi (draft Peraturan Rektor) terkait pengadaan barang dan jasa yang didalamnya juga mengatur konflik kepentingan.** Secara nasional seluruh mekanisme dan proses pengadaan berinduk pada Perpres pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh pemerintah, dan tak terkecuali Unair yang secara statuta adalah PTNBH. Perpres pengadaan barang dan jasa secara umum dan teknis mengatur soal mekanisme pengadaan, termasuk soal prinsip untuk transparan dan terbuka. Akan tetapi PLP setelah melakukan berbagai diskusi menilai perlu untuk kemudian membuat peraturan rektor yang secara teknis mengatur unsur-unsur konflik kepentingan yang harus di jauhi oleh para pihak di internal PLP maupun di lingkungan Unair
- **Adanya upaya untuk standarisasi harga satuan untuk mencegah disparitas harga satuan proyek di lingkungan UNAIR. Direncanakan disahkan tahun 2018.** Standarisasi harga satuan menjadi penting untuk dilakukan agar semua unit yang membutuhkan barang maupun jasa bisa dikoordinir dan tidak memiliki perbedaan harga satuan. Kelebihan dari penyusunan standart ini adalah untuk menghindari potensi terjadi markup atau markdown penentuan harga, dan kelebihan kedua untuk membuat anggaran lebih efisien dan akuntabel
- **PLP terlibat aktif dalam mendukung dan mengerjakan program konflik kepentingan yang sedang dijalankan oleh UNAIR sejak tahun 2016 hingga sekarang.**

#### **Capain Penting :**

1. Dalam 2 (dua) kali pemeriksaan BPK (tahun 2015 dan 2017) tidak ditemukan temuan/masalah terkait dokumen pengadaan dan proses penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan PLP.
2. PLP setiap saat melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa. Diperkirakan terjadi efisiensi anggaran proyek sekitar Rp 30 milyar tahun 2017.

## ❖ **Direktorat Sumberdaya Manusia**

Direktorat Sumberdaya Manusia merupakan salah satu direktorat yang masuk sebagai sektor percobaan pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan. SDM merupakan direktorat yang mempunyai posisi strategis dalam mengatur sirkulasi dan menjaga kualitas sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Unair, termasuk bagaimana SDM Unair melakukan interaksi dengan pihak luar, sehingga dalam program pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan, ada dua hal yang ditekankan. Pertama, Manajemen Resiko Konflik Kepentingan Pemberian Saksi Ahli. Kedua, manajemen resiko konflik kepentingan dalam hal melakukan penelitian dengan pihak luar.

- **Tri dharma Perguruan Tinggi Universitas Airlangga mewajibkan adanya pengabdian masyarakat bagi seluruh civitas akademika Universitas Airlangga.** Pengabdian masyarakat merupakan salah satu tugas yang dimban oleh Unair. Untuk soal ini diperlukan upaya bagaimana pengabdian masyarakat yang dilakukan benar-benar menjadikan kepentingan public sebagai prioritas utama, sehingga perlu upaya untuk tetap menjaga kepentingan public sebagai prioritas pertama
- **Universitas Airlangga wajib menjamin bahwa civitas akademika yang ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli atau menjadi staf/tenaga ahli lembaga di luar universitas mempunyai komitmen bersama untuk menjunjung tinggi kepentingan umum sesuai dengan etika akademik, obyektifitas ilmu pengetahuan, dan moralitas yang bersumber dari agama.** Keterangan ahli dan staf ahli merupakan satu hal yang agak sulit untuk dihindari, akan tetapi untuk sektor ini diperlukan sebuah upaya untuk mengatur mekanisme dan prosedur soal bagaimana menentukan personal yang akan diminta jadi ahli maupun saksi ahli, sehingga perguruan tinggi bisa memiliki kontrol terhadap SDM yang jadi saksi ahli/keterangan ahli
- **Universitas Airlangga wajib menjaga dan menghindari resiko terjadinya konflik kepentingan dalam penugasan civitas akademika sebagai saksi ahli dan atau staf ahli lembaga di luar universitas.** Soal ini diperlukan sebuah regulasi yang bisa diterbitkan oleh internal universitas untuk mengatur agar tidak terjadi benturan konflik kepentingan dalam pelibatan SDM Unair ketika menjadi saksi ahli dan maupun staff ahli
- **Universitas Airlangga wajib menciptakan lingkungan kerja yang tidak mentoleransi terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.** Diperlukan mekanisme pemberian sanksi bagi personal yang melanggar nilai-nilai ataupun unsur soal konflik kepentingan yang telah diterapkan oleh pihak universitas
- **Direktorat SDM telah membuat draft peraturan rektor soal Tendik.** Draft peraturan ini telah memuat soal bagaimana calon tenaga pendidikan yang mendaftar tidak punya afiliasi atau hubungan keluarga dengan pejabat struktur yang telah menjabat di Unair.